

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan terpenting otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk mendorong kemandirian daerah, khususnya dengan mengurangi ketergantungan pada pendanaan pemerintah pusat. Kemandirian ini terkait erat dengan kemampuan suatu daerah untuk menghasilkan dan mengelola pendapatan daerahnya sendiri. Ketika suatu daerah dapat secara efektif memanfaatkan pendapatan daerahnya sendiri, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan fiskal.

Hal ini memungkinkan penganggaran yang lebih berbasis kebutuhan yang memenuhi kebutuhan penduduk dan mengatasi prioritas pembangunan utama daerah tersebut. Oleh karena itu, optimalisasi seluruh potensi sumber PAD menjadi penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah dan pada akhirnya mewujudkan otonomi yang substantif. Kemampuan daerah untuk meningkatkan penerimaan PAD merupakan faktor penentu dalam mencapai kemandirian keuangan, terlebih dalam kondisi penerapan disiplin fiskal yang menuntut efisiensi belanja dan realokasi anggaran sesuai urgensi pembangunan (Sahrudin & Syahid, 2025).

Pendapatan yang diperoleh daerah biasanya dipengaruhi oleh kemampuan dari ekonomi yang ada. Semakin giat kegiatan ekonomi di suatu wilayah, maka akan semakin besar kemungkinan pendapatan daerah yang bisa didapatkan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan aset tertentu milik

daerah. Dengan demikian, perkembangan ekonomi wilayah menjadi hal yang penting dalam meningkatkan pendapatan yang diperoleh daerah.

Provinsi Jawa Barat dipilih karena memiliki karakteristik strategis dalam perekonomian nasional. Provinsi ini memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, yaitu sekitar 50,49 juta jiwa, sehingga mencerminkan potensi ekonomi yang tinggi. Selain itu, letaknya yang strategis di Pulau Jawa sebagai pusat perekonomian nasional turut mendorong terjadinya urbanisasi dan migrasi penduduk dari berbagai wilayah. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya aktivitas ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta berkembangnya berbagai sektor unggulan daerah, salah satunya sektor pariwisata.

Perkembangan sektor pariwisata di Jawa Barat dapat dilihat dari Kabupaten Bandung yang menjadi salah satu destinasi wisata utama di provinsi tersebut. Kabupaten Bandung memiliki kekayaan alam yang beragam, seperti pegunungan, air terjun, dan berbagai objek wisata lainnya yang menjadikannya sebagai salah satu tujuan wisata unggulan di Indonesia. Bahkan, Kabupaten Bandung tercatat memiliki jumlah Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) terbanyak di Jawa Barat, yaitu mencapai 313 ODTW. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan beberapa wilayah lain di Jawa Barat, seperti Kabupaten Purwakarta yang memiliki sekitar 72 ODTW, Kabupaten Subang sekitar 96 ODTW, dan Kabupaten Sumedang yang memiliki kurang dari 100 ODTW. Perbedaan jumlah destinasi wisata tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung memiliki potensi pariwisata yang lebih besar dan lebih berkembang dibandingkan beberapa daerah lainnya di Jawa Barat. Potensi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk merumuskan berbagai kebijakan strategis,

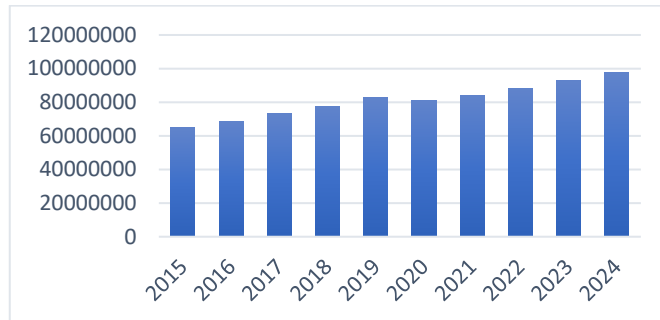
termasuk melalui Renstra Disbudpar, guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan serta memperkuat daya saing destinasi wisata daerah (Gagas Bahrul Ilmi, 2025).

Kabupaten Bandung yang terkenal dengan pilihan wisata yang bervariasi dan juga menakjubkan termasuk tempat-tempat wisata alam, budaya, buatan manusia yang menarik banyak pengunjung setiap tahun, dan memiliki objek wisata yang cukup banyak di provinsi Jawa Barat sebesar 922 destinasi wisata. Sektor pariwisata tidak hanya menjadi penggerak ekonomi lokal akan tetapi juga dapat menjadi sumber pendapatan bagi daerah melalui pajak dan retribusi. Seiring berkembangnya sektor pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bandung menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata, tetapi juga pada sektor-sektor terkait seperti perhotelan, restoran, transportasi, dan industri kreatif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pariwisata memiliki efek multiplikasi (*multiplier effect*) yang kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (Gagas Bahrul Ilmi, 2025).

Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ditandai dengan pengaruh timbal balik dalam sistem ekonomi lokal. Kenaikan PDRB berkontribusi pada peningkatan potensi pendapatan daerah seiring dengan bertumbuhnya kegiatan ekonomi di masyarakat. Di sisi lain, peningkatan PAD memberikan keleluasaan fiskal yang lebih bagi penda untuk mendanai proyek pembangunan dan layanan publik yang selanjutnya

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tabel di bawah ini menampilkan PDRB untuk Kabupaten Bandung sebagai berikut:

Gambar 1. 1 PDRB Kab. Bandung



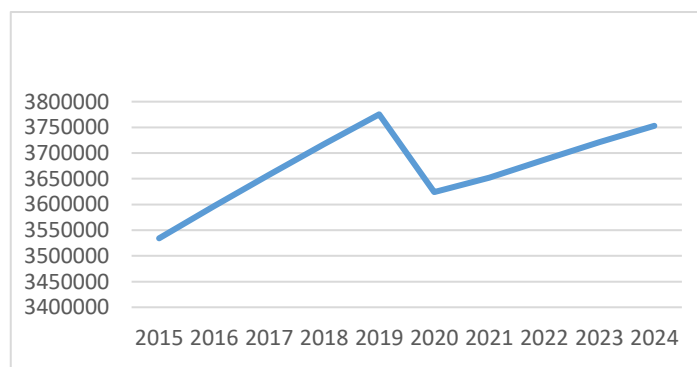
Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Bandung juga menunjukkan perkembangan positif dalam laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2015 PDRB di Wilayah Bandung tercatat sebesar 64.701,52 triliun rupiah dan mengalami peningkatan yang konsisten hingga mencapai 97.509,91 triliun rupiah pada tahun 2024. Pertumbuhan ini menunjukkan perkembangan ekonomi regional yang stabil dan menandakan bahwa Wilayah Bandung berhasil menjaga ritme pertumbuhannya.

Menurut Sari (2019) ketika struktur perekonomian suatu daerah masih lemah, maka pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto belum tentu mampu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara signifikan. Hal ini terjadi karena PDRB yang tumbuh belum ditopang oleh sektor-sektor produktif yang memiliki keterkaitan kuat dengan basis pajak daerah. Akibatnya, peningkatan PDRB tidak serta-merta berujung pada kenaikan PAD jika pemerintah daerah belum optimal dalam mengoptimalkan potensi pajak yang ada dan memperluas objek pajak baru.

Namun, peningkatan PDRB tidak serta-merta berujung pada kenaikan PAD jika pemerintah daerah belum optimal dalam mengoptimalkan potensi pajak yang ada dan memperluas objek pajak baru. Di balik pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung tersebut, terdapat faktor demografi yang ikut tumbuh sejalan yaitu jumlah penduduk. Sebagai daerah yang ditopang oleh sektor industri, pertanian, dan pariwisata, Kabupaten Bandung memiliki penduduk sebanyak 3.753.120 jiwa pada tahun 2024. Skala jumlah penduduk sebesar ini pada dasarnya menjadi modal penting bagi penerimaan daerah, karena penduduk sekaligus berperan sebagai pembayar pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, sekaligus sebagai konsumen yang menghidupkan penerimaan dari pajak hotel, restoran, dan hiburan melalui aktivitas mereka sehari-hari.

Gambar 1. 2 Jumlah Penduduk Kab. Bandung



Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

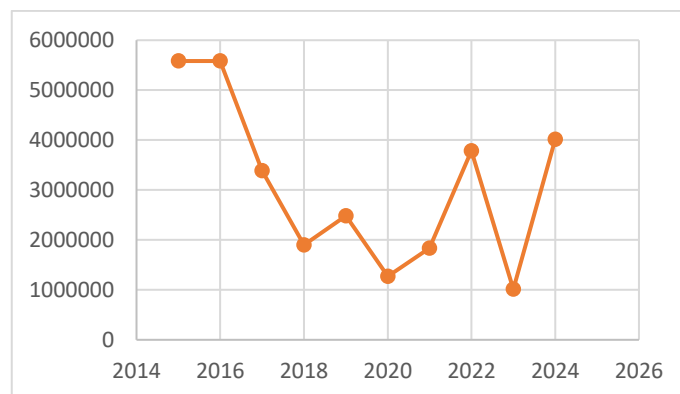
Namun, realisasi PAD Kabupaten Bandung tidak hanya ditentukan oleh konsumsi penduduk. Sebagai salah satu destinasi wisata utama, Kabupaten Bandung dikunjungi oleh wisatawan nusantara hingga jutaan orang per tahun. Kehadiran wisnus ini secara langsung mendorong penerimaan dari pajak hotel,

restoran, dan retribusi objek wisata di Ciwidey, Rancabali, dan Pangalengan. Perubahan jumlah kunjungan wisnus yang sangat tajam inilah yang diduga menjadi penyebab utama PAD Kabupaten Bandung bergerak tidak stabil.

Meskipun demikian, meski sudah didukung oleh tiga modal utama tersebut realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung justru menunjukkan tren yang tidak sejalan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, PDRB Kabupaten Bandung tumbuh konsisten setiap tahun dan jumlah penduduk terus bertambah hingga menembus 3,75 juta jiwa pada 2024.

Karena daerah ini dikenal kaya akan warisan alam dan budaya serta menawarkan pengalaman wisata yang beragam dan menarik (Samuel, 2021). Setiap tahunnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bandung semakin meningkat, dapat dilihat dari gambar dibawah ini:

Gambar 1. 3 Jumlah Wisatawan Nusantara Kab. Bandung

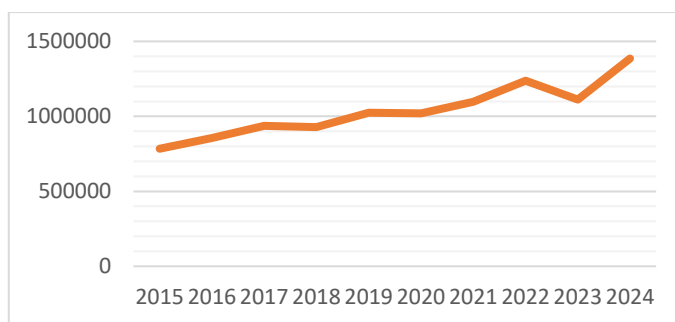


Sumber: Open Data Jabar (2025)

Di sisi lain, kunjungan wisatawan nusantara juga sempat mencapai angka tertinggi pada 2022. Dengan tiga potensi sebesar ini, PAD seharusnya dapat tumbuh signifikan dan stabil setiap tahun. Akan tetapi, pada kenyataannya pertumbuhan PAD justru cenderung stagnan dan sangat dipengaruhi oleh jumlah wisatawan

nusantara ketika jumlah wisnus mengalami penurunan drastis PAD ikut menurun pada periode yang sama padahal PDRB dan jumlah penduduk tetap menunjukkan tren pertumbuhan. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara potensi fiskal yang dimiliki dengan realisasi PAD serta mengindikasikan bahwa kontribusi PDRB dan jumlah penduduk sebagai basis pajak jangka panjang belum optimal, sehingga PAD Kabupaten Bandung masih didominasi oleh pajak konsumsi yang bergantung pada wisatawan.

Gambar 1. 4 PAD Kab. Bandung



Sumber: DJPK Kemenkeu (2025)

Melihat kembali tiga modal utama yang dimiliki Kabupaten Bandung, seharusnya kondisi PAD dapat tumbuh lebih kuat dan konsisten. Di satu sisi, PDRB Kabupaten Bandung terus tumbuh positif berkat sektor industri, pertanian, dan pariwisata. Di sisi lain, jumlah penduduk yang mencapai 3,75 juta jiwa pada 2024 memperluas basis pajak daerah sekaligus konsumen. Sementara itu, kunjungan wisatawan nusantara meski naik-turun, total jumlahnya tetap menembus jutaan orang setiap tahun.

Akan tetapi, realita di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi tersebut dengan capaian PAD. Ketika jumlah wisatawan nusantara mengalami penurunan drastis, PAD tercatat ikut menurun pada periode yang sama, padahal pada saat itu PDRB dan jumlah penduduk tetap dalam tren meningkat.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa PAD Kabupaten Bandung masih sangat bergantung pada penerimaan dari sektor pariwisata yang bersifat musiman, sementara kontribusi PDRB dan jumlah penduduk sebagai basis pajak yang stabil belum optimal.

Kesenjangan antara besarnya potensi ekonomi, demografi, dan pariwisata dengan realisasi PAD yang tidak stabil inilah yang menjadi latar belakang penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Wisatawan Nusantara terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung.

Beberapa studi sebelumnya yang meneliti hubungan antara produk domestik regional bruto, jumlah penduduk, dan jumlah wisatawan nusantara terhadap PAD telah menghasilkan hasil yang tidak konsisten. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh karakteristik masing-masing wilayah, periode waktu yang diteliti, dan dinamika ekonomi yang berubah, khususnya sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Dengan latar belakang ini, studi ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka analitis yang dapat berfungsi sebagai dasar untuk perumusan kebijakan, khususnya terkait upaya untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah di Kabupaten Bandung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi latar belakang yang telah dijelaskan di atas, pertanyaan penelitian berikut dapat dirumuskan:

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana Jumlah Penduduk memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bandung?
3. Apakah Jumlah Wisatawan Nusantara memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui jumlah wisatawan nusantara terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disajikan, penelitian ini berfokus pada penelitian tentang pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, jumlah penduduk dan jumlah wisatawan nusantara terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Bandung antara tahun 2015 dan 2024.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Menjadi rujukan akademik dalam kajian ekonomi dan pembangunan yang khususnya terkait analisis implementasi otonomi daerah beserta dampaknya terhadap kapasitas fiskal daerah.
2. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang bermaksud melakukan pengembangan kajian serta mengisi celah penelitian yang belum terakomodasi.
3. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan terutama Pemerintah Kabupaten Bandung, dalam merumuskan perencanaan dan strategi pembangunan daerah yang berorientasi pada penguatan kemandirian ekonomi.